

# Implementasi Konsep Agile Governance dalam Penanganan Krisis Ekonomi Pasca Pandemi COVID-19 di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

Sri Sulastri<sup>1</sup> Ane Permatasari<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup> Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

<sup>2</sup> SDGs Center, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

**Abstract.** The COVID-19 pandemic has had a major impact on various aspects of Indonesian people's lives. This impact has affected various sectors such as social, education, tourism, and also the economy that is undergoing a drastic decline. This economic decline has not only occurred on a national scale, but also in areas including the Yogyakarta Special District province. Therefore, the DIY Government has undertaken various policies and efforts to mitigate the impact of the spread of Covid-19 and collaborate with various parties. The study aims to analyze the management of the post-COVID-19 pandemic economic crisis in Yogyakarta Special District using the concept of agile governance. There are six (six) principles of agile governance: good enough governance, business driven, human focused, based on quick wins, systematic and adaptive approach, and simple design and continuous refinement. This research uses qualitative research methods with a descriptive approach. The result in this study is that the DIY Government has been agile, precise, responsive, and agile in dealing with the post-Covid-19 pandemic economic crisis. This is proved by six very well-fulfilled principles of agile governance, demonstrated by public participation, transparency of information, and the clear vision of the DIY government in the post -COVID-19 pandemic economic crises. In addition, there is a programme of incentive assistance to UMKM perpetrators and there is monitoring and evaluation of the program so that it can run with maximum efficiency. However, there is a note in the principle section based on quick wins, namely by improving information services so that all communities can access them easily.

**Keywords:** agile governance, economic krisis, covid-19 pandemic

**Abstrak.** Pandemi COVID-19 telah berdampak besar pada berbagai aspek kehidupan masyarakat Indonesia. Pengaruh ini berdampak pada berbagai sektor seperti sosial, pendidikan, pariwisata, dan juga perekonomian yang mengalami penurunan drastis. Penurunan ekonomi ini tidak hanya terjadi dalam skala nasional, tetapi juga di daerah termasuk provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Oleh karena itu, Pemerintah DIY telah melakukan berbagai kebijakan dan upaya untuk mengurangi dampak penyebaran Covid-19 dan berkolaborasi dengan berbagai pihak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penanganan krisis ekonomi pasca pandemi COVID-19 di Daerah Istimewa Yogyakarta dengan menggunakan konsep *agile governance*. Terdapat 6 (enam) prinsip *agile governance* yaitu *good enough governance*, *business driven*, *human focused*, *based on quick wins*, *systematic and adaptive approach*, dan *simple design and continuous refinement*. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Hasil dalam penelitian ini adalah Pemerintah DIY telah *agile*, *precise*, *responsive*, dan *agile* dalam menangani krisis ekonomi pasca pandemi Covid-19. Hal ini dibuktikan dengan enam prinsip *agile governance* yang sangat terpenuhi dengan baik, terbukti dengan adanya partisipasi masyarakat, transparansi informasi, dan visi yang jelas dari Pemerintah DIY dalam krisis ekonomi pasca pandemi COVID-19. Selain itu juga terdapat program pemberian bantuan insentif kepada para pelaku UMKM dan adanya monitoring dan evaluasi terhadap program sehingga dapat berjalan dengan maksimal. Namun, ada catatan di bagian prinsip berdasarkan quick wins, yaitu dengan meningkatkan layanan informasi agar semua masyarakat dapat mengaksesnya dengan mudah.

**Kata Kunci:** *Agile Governance*, Krisis Ekonomi, Pandemi Covid-19

Received: 26/05/2023

Revised: 19/09/2023

Accepted: 24/09/2023

**\*Korespondensi:**

FISIP Universitas Muhammadiyah Yogyakarta  
Jl. Lingkar Selatan, Geblagan, Tamantirto, Bantul Daerah  
Istimewa Yogyakarta  
Email: serinsry@gmail.com

## PENDAHULUAN

Pada penghujung tahun 2019, seluruh masyarakat dunia digemparkan dengan sebuah penyakit menular dari China. Penyakit tersebut menyerang organ pernafasan yang dapat mengakibatkan batuk, flu, demam, sesak nafas hingga kematian. Kasus pertama penyakit ini terdapat di Kota Wuhan dan menyebar dengan cepat keseluruh dunia (WHO, 2020). Pada tanggal 11 Februari 2020, World Health Organization (WHO) secara resmi mengumumkan bahwa penyakit menular tersebut bernama *Coronavirus Disease* atau COVID-19. Jika penyakit ini menyerang pernafasan manusia maka akan mengakibatkan gangguan pada saluran pernafasan seperti SARS dan MERS (Utama, 2021). Seiring berjalannya waktu penyakit ini menyebar dengan cepat ke berbagai negara di belahan dunia salah satunya Indonesia.

Pada awal bulan Maret tahun 2020, Presiden Joko Widodo secara resmi mengumumkan adanya kasus COVID-19 yang pertama kali di Indonesia. Bersamaan dengan pengumuman tersebut, kasus COVID-19 di Indonesia semakin meningkat dan menyebar dengan cepat. Berdasarkan data, pada bulan Maret 2020 kasus positif COVID-19 mencapai angka 1.528 kasus (Nugraheny, 2020). Kemudian, data di bulan April 2020 mencapai 10.118 kasus. Sedangkan, lonjakan tertinggi terdapat pada bulan Mei 2020 yang mencapai 26.473 kasus (Hakim, 2020). Lonjakan yang sangat tinggi setiap bulannya menjadikan wabah COVID-19 ini bukanlah fenomena yang patut diabaikan. Melihat kondisi tersebut, Pemerintah dituntut untuk bergerak cepat dan gesit dalam menangani kasus COVID-19. Oleh karena itu, pemerintah mengeluarkan kebijakan berupa Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang tercantum dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020. Aturan ini menyebabkan adanya pembatasan melakukan aktivitas di luar rumah, bekerja di rumah, kegiatan ajar mengajar di rumah, ibadah di rumah, dan menerapkan protokol kesehatan (Nasruddin, 2020).

Pandemi COVID-19 ini telah mempengaruhi berbagai bidang kehidupan penduduk Indonesia. Pengaruh tersebut memberikan dampak yang dapat dirasakan di berbagai bidang seperti sosial, pendidikan, pariwisata, dan tidak luput juga ekonomi yang mengalami penurunan drastis (Putra, 2020). Penurunan ekonomi ini tidak hanya terjadi di skala nasional, tetapi juga di skala daerah termasuk provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Meskipun Pemerintah DIY telah melakukan berbagai kebijakan untuk mengurangi dampak penyebaran COVID-19 seperti melakukan PSBB dan kesiapan tenaga medis,

perekonomian di DIY masih belum terkendalikan. Hal ini dapat dilihat dari pertumbuhan ekonomi triwulan III yang melambat dibandingkan dengan triwulan sebelumnya. Lambatnya pertumbuhan ekonomi tersebut menyebabkan perekonomian DIY mengalami kontradiksi mencapai angka 6,74 persen dengan pencapaian dibawah pertumbuhan ekonomi nasional (BPK RI, 2021). Di tengah kondisi pandemi COVID-19 yang terus meningkat dan berubah-ubah, Pemerintah DIY dituntut untuk cepat dan tepat dalam mengambil kebijakan. Hal ini sependapat dengan prediksi Bank Indonesia yang menyatakan bahwa perekonomian DIY pada tahun 2021 akan tumbuh kisaran 5,4 persen hingga 6,2 persen dan untuk mencapai angka tersebut, perlu kerjasama dan kolaborasi serta sinergi seluruh *stakeholders* baik itu Pemerintah, Instansi Kesehatan, Dunia Usaha, maupun Masyarakat DIY (Humas Provinsi Jogja, 2021).

Konsep *Agile Governance* dapat menjadi salah satu solusi dalam mengatasi permasalahan COVID-19 di DIY. Kata *agile* memiliki arti gesit, sedangkan *governance* memiliki arti tata kelola pemerintahan. Jadi, *agile governance* adalah tata kelola pemerintahan yang gesit dan memiliki kemampuan dalam mengikuti perkembangan zaman dan tuntutan masyarakat. *Agile Governance* menurut Holmqvist & Pessi (2016) dalam (Padmaningrum, 2021) diartikan sebagai kemampuan sebuah lembaga atau organisasi dalam merespon secara cepat perubahan yang datang dengan tiba-tiba dalam mencapai tujuan yang telah menjadi kebutuhan masyarakat yang semakin berubah-ubah. *Agile Governance* disebut juga sebagai konsep pemerintahan yang cerdas karena memiliki keunggulan dalam melakukan simplifikasi terhadap sistem birokrasi dan fokus pada kecepatan dan kemudahan dalam mengelola pemerintahan (Firhansyah, 2021).

Pengertian *agile governance* Menurut Huang, Pan, dan Ouyang (2014) adalah kemampuan sebuah organisasi atau lembaga dalam menggunakan anggaran secara efisien dan dapat melihat peluang atau keuntungan dengan cergas sehingga menghasilkan suatu kebijakan atau upaya yang solutif dan inovatif. *Agile governance* juga diartikan sebagai pemerintahan yang cepat, tangkas, dan tanggap dalam merespons perubahan yang tidak terduga. Menurut Menurut Alexandre J. H. de O. Luna, Philippe Kruchten, Marcello L. G. do E. Pedrosa, Humberto R. de Almeida Neto, dan Hermano P. de Moura dalam menjalankan konsep *agile governance* memiliki enam prinsip yang dapat digunakan, antara lain yaitu:

1. *Good Enough Governance* (tata kelola pemerintah yang baik), tata kelola pemerintahan yang baik ini harus menyesuaikan dengan lingkungan dan kebutuhan organisasinya.
2. *Business Driven* (Berlandaskan pada bisnis), dalam mengambil kebijakan, keputusan, dan tindakan sebuah bisnis harus menjadi alasan.
3. *Human Focused* (Fokus pada manusia), kebijakan yang diambil haruslah berfokus pada perasaan manusia seperti dihargai dan dilibatkan untuk berpartisipasi.
4. *Based on Quick Wins* (Berdasarkan keberhasilan cepat), dalam sebuah keberhasilan harus diapresiasi dengan tujuan dapat dijadikan motivasi untuk melakukan hasil yang lebih baik
5. *Systematic and Adaptive Approach* (Pendekatan yang sistematis dan adaptif), dalam sebuah kelompok harus mampu meningkatkan kompetensinya sehingga berubah menjadi lebih sistematis dan adaptif pada suatu perubahan.
6. *Simple Design and Continuous Refinement* (Desain yang sederhana dan berkelanjutan), dalam sebuah kelompok harus mampu menghasilkan upaya dengan cepat dan tepat sehingga dapat memberikan solusi yang berkelanjutan.

Seiring berjalannya waktu Pemerintah Indonesia pun mulai mengimplementasikan konsep *agile governance* dalam tata kelola pemerintahannya. Beberapa penelitian diantaranya penelitian Rengga Vernanda (2020) membahas tentang kesiapan Pemerintah Negara Indonesia dalam menuju *agile governance*. Dalam penelitiannya menghasilkan bahwa sebelum pemerintah Indonesia menuju konsep *agile governance* Pemerintah Indonesia perlu melakukan perbaikan dalam sektor teknologi informasi. Hal ini dikarenakan Indonesia menjadi salah satu negara yang masih tertinggal dalam pembangunan TIK dibandingkan dengan negara-negara di kawasan ASEAN (Vernanda & Negar, 2009). Hal ini senanda dengan penelitian (Ilham et al, 2020) yang membahas tentang kesiapan Pemerintah Daerah dalam menuju konsep *agile governance*. Dalam penelitiannya menyoroti Pemerintahan Kabupaten Banyuwangi yang menciptakan inovasi dalam menunjang penyelenggaraan Pemerintahan dengan menerapkan konsep dari *agile governance*. Dalam menerapkan konsep tersebut Pemerintah Banyuwangi selalu melibatkan pihak atau instansi lain salah satunya Dinas Komunikasi, Informatika, dan Persandian yang bertujuan sebagai *leading sector* pengembangan inovasi pemerintahan berbasis teknologi. Selain itu, dalam menerapkan konsep *agile governance* Pemerintah

Banyuwangi berfokus pada aspek manajer, transparansi, inovasi, koordinasi terstruktur, egaliter, otonom dan berjejaring, dan komunikasi terbuka.

Sagala dkk (2020) menulis tentang kebijakan yang dilakukan oleh Pemerintah dalam menangani kasus COVID-19. Penelitian ini menghasilkan bahwa kolaborasi dari seluruh sektor Pemerintahan sangat penting sebagai upaya mengatasi pandemi COVID-19 dan salah satu caranya adalah dengan menerapkan konsep *agile governance* dalam tata kelola pemerintahan. Hal ini bertujuan agar konsep *agile governance* dapat memberikan perlakuan yang tepat dalam menjalankan kebijakan (Sagala et al, 2020). Hal senada juga diungkapkan melalui penelitian Apriliyanti dkk (2021) yang membahas tentang implementasi kebijakan Pemerintah di masa pandemi COVID-19 ditinjau dari konsep *agile governance*. Penelitian yang dilakukan di Pemerintahan Surabaya ini menghasilkan bahwa terdapat desentralisasi, dimana strategi dari Pemerintahan Pusat dapat memberikan pengaruh terhadap kebijakan yang dibuat oleh daerah dan dalam konsep *agile governance*, *Based on Quick Wins* sangat dominan dalam penelitian ini, dimana kebijakan yang telah dibuat dapat memikat kebijakan lainnya. Dengan kebijakan itu, Kota Surabaya dinilai mampu melalui gelombang pertama terjadinya pandemi COVID-19 walaupun dalam pelaksanaannya terdapat kendala berupa budaya Arek Suroboyo yaitu budaya Cangkrukan atau nongkrong bersama yang dapat mengakibatkan adanya gelombang kedua pandemi COVID-19 (Apriliyanti, 2021). Dalam penelitian Ja'faar Muhammad dkk (2022) membahas tentang upaya pemerintah dalam menjaga ketahanan dalam menghadapi Pandemi COVID-19. Penelitian ini menghasilkan bahwa terdapat sentralisasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam upaya penanganan COVID-19 yang lebih condong pada tata kelola pemerintahan yang (Jafar, 2022).

Kebijakan tentang *agile governance* juga diimplementasikan pada sektor teknologi informasi, seperti penelitian oleh Farhan Rahmawan dkk (2021) meneliti tentang Implementasi Prinsip *Agile Governance* Melalui Aplikasi PIKOBAR di Provinsi Jawa Barat sebagai kebijakan dalam penanganan pandemi COVID-19 (Halim et al., 2021). Di sektor lain yaitu kesehatan, Winda Kusumawati (2021) membahas tentang konsep *agile governance* di Dinas Kesehatan Kabupaten Tulungagung dalam menghadapi Pandemi COVID-19. Penelitian tersebut menghasilkan bahwa bahwa konsep *agile governance* berjalan dengan baik dan dapat diterapkan (Kusumawati, 2021). Penelitian senada juga dilakukan oleh Nurul Siti dkk (2022) yang menggunakan prinsip *agile governance* yang diterapkan di Dinas

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung dalam melakukan pelayanan publik (Siti et al, 2022).

Adapun penelitian mengenai *agile governance* di berbagai negara. Salah satunya penelitian yang dilakukan oleh Thailana (2017) yang membahas tentang penerapan konsep *agile governance* di Negara Brazil pada masa Pandemi COVID-19. Penelitian ini menghasilkan bahwa konsep dari *agile governance* diimplementasikan dalam peningkatan kinerja dan kualitas pelayanan publik di Pemerintahan Brazil. Penelitian yang sama juga dilakukan di Negara Belanda dalam penelitian Marijn Janssen dan Haiko Van Der Vort (2020). Dalam penelitian tersebut berfokus penanganan Pandemi COVID-19 yang menghasilkan bahwa terdapat perbedaan secara praktis dan teoritis terhadap konsep *agile* dan *adaptive governance* (Vort, 2020).

Dari semua penelitian terkait penerapan *agile governance* di masa pandemi COVID-19 dapat disimpulkan bahwa masih minim artikel yang membahas tentang konsep *agile governance* yang digunakan dalam penanganan krisis ekonomi di pasca pandemi COVID-19. Melihat dengan adanya prinsip-prinsip dalam *agile governance* yang dinilai mampu dalam mengatasi permasalahan yang dihadapi oleh Pemerintah salah satunya penurunan ekonomi di suatu daerah akibat adanya pandemi COVID-19. Oleh karena itu, peneliti memiliki posisi untuk mengisi kekosongan tersebut karena kajian tentang penanganan krisis ekonomi pasca pandemi COVID-19 menjadi topik yang menarik untuk dibahas. Selain untuk memperluas kajian tentang konsep *agile governance* penelitian ini juga akan berguna untuk mengembangkan kajian-kajian lainnya. Maka kebaruan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui “Implementasi Konsep *Agile Governance* Dalam Penanganan Krisis Ekonomi Pasca Pandemi COVID-19 Di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta”.

## METODE PENELITIAN

Metode dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Metode kualitatif ini merupakan jenis penelitian yang hasil temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau dalam bentuk hitungan. Tujuan dari metode ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis kondisi suatu konteks dengan mengarahkan pada pendeskripsian secara rinci dan mendalam mengenai potret kondisi yang natural (Fadli, 2021). Oleh karena itu, pada penelitian menggunakan pendekatan kualitatif karena dapat digunakan untuk menjelaskan tujuan dari penelitian. Selain itu, dengan menggunakan

penelitian kualitatif juga dapat menggambarkan secara mendalam dan sistematis permasalahan yang ada dalam penelitian ini.

Penelitian ini juga menggunakan pendekatan deskriptif. Pendekatan deskriptif bertujuan untuk memberikan penjelasan dan gambaran terkait fenomena penelitian. Penelitian dengan metode ini juga dapat menggambarkan secara mendalam dan sistematis permasalahan yang ada dalam penelitian (Fadli, 2021). Sumber data dari penelitian ini berasal dari data kepustakaan atau studi *literatur*. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan kajian pustaka atau *literature review*. Kemudian data yang telah dikumpulkan dianalisis menggunakan teknik analisis menurut Miles dan Huberman (1992: 16). Teknik tersebut terdiri dari beberapa tahapan antara lain yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan *literature review* pada artikel dan berita terkait dengan topik permasalahan. Kemudian data direduksi agar data yang telah dikumpulkan oleh peneliti dapat spesifik terhadap topik permasalahan. Selanjutnya data disajikan dengan menganalisis data menggunakan konsep *agile governance* menurut Menurut Alexandre J. H. de O. Luna, Philippe Kruchten, Marcello L. G. do E. Pedrosa, Humberto R. de Almeida Neto, dan Hermano P. de Moura. Tahap selanjutnya yaitu penarikan kesimpulan dari hasil analisis data yang diperoleh.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Analisis Fenomena Krisis Ekonomi di Masa Pandemi Covid-19 Daerah Istimewa Yogyakarta

Yogyakarta merupakan daerah yang memiliki julukan Daerah Istimewa. Hal tersebut dikarenakan bentuk pemerintahannya yaitu kerajaan yang dipimpin oleh seorang Sultan. Selain itu, Yogyakarta juga menjadi salah satu kota yang memiliki tingkat kebahagiaan tinggi. Dilansir dari data BPS tahun 2021, tingkat kebahagiaan di DIY mencapai angka 71,70. Angka tersebut merupakan tingkat kebahagiaan tertinggi di Pulau Jawa (Helen, 2023).

Namun, disamping menjadi kota dengan kebahagiaan tertinggi DIY juga menjadi provinsi termiskin di Pulau Jawa. Hal tersebut dikarenakan kecilnya jumlah Upah Minimum Provinsi (UMP). Berdasarkan Surat Keputusan Gubernur DIY No. 372/KEP/2021 Upah

Minimum Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta hanya sebesar Rp1.840.915,53. UMP tersebut menjadi nilai terkecil kedua di Indonesia setelah Provinsi Jawa Tengah.

Pandemi COVID-19 yang melanda Indonesia pada awal Maret 2020 memberikan dampak yang signifikan bagi kehidupan masyarakat Indonesia termasuk juga Daerah Istimewa Yogyakarta. Akibat dari adanya pandemi ini, Pemerintah dituntut untuk segera mengeluarkan kebijakan yang tepat agar memutuskan rantai penyebaran COVID-19. Pemerintah DIY mengeluarkan kebijakan pembatasan mobilisasi sosial berskala besar dan kebijakan untuk menerapkan protokol kesehatan. Dengan adanya kebijakan tersebut memberikan dampak bagi kehidupan masyarakat DIY salah satunya mengalami krisis ekonomi. Menurut Afarat (2009) dalam (Sari, 2016) krisis ekonomi merupakan sebuah peristiwa yang mencakup seluruh sektor perekonomian pasar dunia mengalami keruntuhan atau berada dalam situasi gawat yang dapat mempengaruhi berbagai sektor. Krisis ekonomi merupakan kondisi dimana perekonomian di suatu negara atau daerah mengalami penurunan secara drastis. Jika suatu negara telah menghadapi kondisi tersebut maka akan mengalami penurunan Produk Domestik Bruto atau PDB, lemahnya harga saham dan properti, inflasi yang mengalami fluktuasi, dan pertumbuhan ekonomi yang lambat.

Pandemi COVID-19 telah mengganggu perputaran ekonomi Indonesia termasuk DIY. Hal ini disebabkan karena pertumbuhan ekonomi sangat dipengaruhi oleh belanja barang atau jasa (*consumption*) dan *consumption* merupakan salah satu pendongkrak terbesar pemasukan ekonomi jika dibandingkan dengan produk domestik bruto (PDB). Namun, sejak adanya kebijakan pembatasan sosial berskala besar jumlah konsumsi mengalami penurunan yang sangat drastis sehingga pertumbuhan ekonomi mengalami penurunan (Zubaidah, 2021). Selama masa pandemi *Covid-19*, kondisi perekonomian di DIY mengalami kontradiksi hingga 2,69 persen di akhir tahun 2020. Dengan adanya kontradiksi tersebut memberikan imbas yang besar bagi lemahnya kinerja diberbagai usaha, terutama pada sektor pariwisata. Disisi lain dengan kondisi perekonomian yang menurun menyebabkan adanya tingkat pengangguran yang tinggi serta tingkat kemiskinan yang semakin melonjak.

Dampak pandemi COVID-19 terhadap perekonomian di DIY sangatlah besar dan melanda segala sektor. Pada sektor pariwisata mengalami penurunan yang cukup drastis, akibatnya banyak hotel, restoran, dan tempat wisata yang tutup baik sementara maupun

tutup permanen karena bangkrut. Menurut Asosiasi Biro Perjalanan Wisata Indonesia (ASITA) DIY menjelaskan bahwa sektor pariwisata DIY pada tahun 2020 mengalami kerugian sekitar 27 Miliar yang disebabkan oleh tidak tercapainya target kunjungan wisata (Prayudi, 2020). Sedangkan pada sektor pertanian dan industri masih memberikan nilai yang cukup dominan dalam perekonomian DIY karena masih dapat memberikan andil yang sedikit lebih maju selama masa pandemi COVID-19. Sementara pada sektor penyediaan makan minum dan konstruksi mengalami penurunan selama masa pandemi.

Kondisi perekonomian di DIY sebenarnya tidak mengalami perubahan yang sangat signifikan setelah masa pandemi COVID-19 karena masih pada kuadran II namun tetap pada pertumbuhannya mengalami penurunan. Artinya pertumbuhan ekonomi di DIY dapat mampu dioptimalkan dengan cepat meskipun mengalami kendala dalam daya saing skala nasional (BPS Yogyakarta, 2021). Oleh karena itu, perlu adanya kebijakan yang cepat dan tepat dari Pemerintah DIY dalam menangani krisis ekonomi pasca pandemi Covid-19. Salah satu konsep yang tepat digunakan oleh Pemerintah Daerah DIY yaitu dengan konsep *agile governance* atau pemerintah yang cergas.

### **Penerapan Prinsip Agile Governance dalam Menangani Krisis Ekonomi Pasca Pandemi COVID-19 di DIY**

Kasus COVID-19 yang terus menerus mengalami peningkatan memberikan dampak yang signifikan di berbagai sektor termasuk sektor perekonomian yang mengalami penurunan drastis. Oleh karena itu, pemerintah dituntut dapat mengambil kebijakan, keputusan, dan tindakan yang cepat dan tepat. Salah satunya dengan menerapkan konsep *agile governance*. Menurut Menurut Alexandre J. H. de O. Luna, Philippe Kruchten, Marcello L. G. do E. Pedrosa, Humberto R. de Almeida Neto, dan Hermano P. de Moura dalam menjalankan konsep *agile governance* memiliki enam prinsip yang dapat digunakan dalam mengatasi permasalahan antara lain yaitu *good enough governance*, *business driven*, *human focused*, *based on quick wins*, *systematic and adaptive approach*, dan *simple design and continuous refinement*.

#### **Good Enough Governance (Tata kelola pemerintahan yang baik)**

Pada prinsip *good enough governance* ini mengutamakan bagaimana tata kelola pemerintahan yang benar dan baik dengan beberapa indikator:

1. Partisipasi masyarakat

Pada proses pemulihan perekonomian, partisipasi masyarakat Yogyakarta diikutsertakan dalam pemberdayaan masyarakat dan optimalisasi Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang dibantu dengan sinergi bersama antara Pemerintah dengan sektor swasta dengan pengelolaan penyaluran dana *Corporate Social Responsibility* (CSR) (Rusqiyati, 2022). Selain itu, masyarakat juga ikut serta dalam penerapan aturan untuk menjaga protokol kesehatan, melakukan vaksinasi COVID-19 di wilayah terdekat guna untuk mengurangi dampak penyebaran virus korona, dan mengelola sumber daya alam yang untuk untuk dijadikan bahan produksi UMKM .

## 2. Transparansi

Adanya transparansi data kasus COVID-19 di Daerah Istimewa Yogyakarta yang terdapat dalam laman *website corona.jogjaprov.go.id* memberikan informasi yang terupdate secara berkala sehingga masyarakat dapat mengetahui mengenai perkembangan COVID-19 di Daerah Istimewa Yogyakarta. Serta terdapat laporan perekonomian di DIY yang berguna untuk mengetahui fluktuasi ekonomi di DIY.

## 3. Visi Strategis

Perencanaan jangka pendek dan jangka panjang dalam penanganan krisis ekonomi akibat pandemi COVID-19 sangat diperlukan. Hal ini bertujuan agar Pemerintah memiliki target yang akan dicapai. Pemerintah DIY memiliki perencanaan dalam jangka pendek berupa percepatan pelaksanaan vaksinasi COVID-19. Hal ini agar dapat mengurangi dampak penyebaran virus di DIY. Sedangkan rencana jangka panjang yang dilakukan Pemerintah DIY adalah dengan melakukan program penanggulangan kemiskinan untuk perbaikan ekonomi. Dalam Surat Edaran Wakil Gubernur DIY No. 456/7087 tahun 2021 tentang Inventarisasi Program Penanggulangan Kemiskinan anggaran yang dialokasikan untuk program tersebut senilai Rp273 Miliar 733 Juta sehingga membantu dalam penurunan tingkat kemiskinan di DIY. Dengan program tersebut tingkat kemiskinan di DIY mengalami penurunan dari 12,8 persen menjadi 11,91 persen (Pemda DIY, 2022). Selain itu untuk memperbaiki perekonomian di DIY, pemerintah DIY melakukan pemberdayaan UMKM serta memberikan bantuan sembako, perkembangan wirausaha baru, dan pelatihan peningkatan pertanian (Listyadewi, 2020).

Maka, dapat disimpulkan berdasarkan prinsip *good enough governance*, menunjukkan hasil yang sangat baik karena terdapat partisipasi dari masyarakat,

transparansi informasi, dan visi yang jelas dalam menangani krisis ekonomi pasca pandemi COVID-19.

### **Business Driven (Berlandaskan pada bisnis)**

Prinsip *business driven* berfokus pada pemecahan masalah yang muncul dan pada saat pengambilan keputusan dilakukan oleh Pemerintah Daerah DIY. Pandemi COVID-19 memberikan dampak yang signifikan bagi pelaku usaha, salah satunya yaitu UMKM. Untuk memulihkan kembali sektor UMKM Pemerintah DIY memberikan insentif dan stimulus bagi pelaku UMKM. Selain itu, Pemerintah DIY juga memanfaatkan teknologi informasi dengan menyediakan lapak *online* yaitu pelaksanaan SiBakul. SiBakul yaitu Sistem Informasi Pembinaan Koperasi dan Pelaku Usaha yang memiliki banyak manfaat, seperti dapat melakukan promosi secara *online*, mendapatkan pelatihan dan pendampingan, *free* ongkos kirim (ongkir), dan pelayanan jasa konsultasi usaha (Putri, 2022). Harapan dengan adanya SiBakul ini dapat memberikan nilai tambah bagi UMKM lapak *online*. Maka dapat disimpulkan berdasarkan prinsip *business*, menunjukkan hasil yang sangat baik, berupa program pemberian bantuan insentif kepada para pelaku UMKM dan bantuan sembako kepada masyarakat yang dapat membantu pertumbuhan ekonomi di DIY.

### **Human Focused (Fokus pada manusia)**

Prinsip *human focused* mengutamakan pada pelaksanaan Pemerintah DIY dalam menangani krisis ekonomi pasca pandemi COVID-19. Pemerintah Daerah bekerjasama dengan Dinas Koperasi dan UKM DIY dalam menggerakkan perekonomian DIY. Selama dua tahun terakhir Pemerintah Daerah DIY dan Dinas Koperasi dan UKM DIY telah berhasil membangkitkan perekonomian DIY hingga Rp50 Miliar. Hal tersebut dihasilkan dari jual beli produk UMKM DIY melalui aplikasi SiBakul dengan program bebas ongkos kirim. Bebas Ongkos Kirim ini merupakan perwujudan Pemerintah DIY dalam memberikan bantuan sebesar Rp6 Miliar untuk membantu UMKM. Oleh karena itu, pada tahun 2022 pertumbuhan ekonomi DIY mengalami peningkatan sebesar 4,9 persen hingga 5,7 persen. Selain itu, bersama dengan Dinas Kesehatan, Pemerintah Daerah DIY melakukan upaya percepatan atau akselerasi program vaksinasi COVID-19 dengan sasaran khususnya adalah warga dengan lanjut usia sebagai kelompok prioritas penanggulangan virus COVID-19 di DIY (Agus, 2021).

Berdasarkan prinsip *human focused* menunjukkan hasil yang sangat baik karena Pemerintah DIY saling gotong royong dan berkolaborasi dengan berbagai instansi dan *stakeholder* dalam menangani krisis ekonomi pasca pandemi COVID-19.

#### **Based on Quick Wins (Berdasarkan keberhasilan yang cepat)**

Prinsip *based on quick wins* berfokus pada pelayanan transparansi kepada masyarakat terkait informasi penanganan kasus COVID-19 dan laporan perekonomian di DIY. Pemerintah DIY telah memberikan layanan informasi terkait penanganan COVID-19 dalam laman *website corona.jogjaprov.go.id* memberikan informasi yang *terupdate* secara berkala sehingga masyarakat dapat mengetahui mengenai perkembangan COVID-19 di Daerah Yogyakarta. Untuk laporan perekonomian di Daerah Istimewa dapat diakses melalui laman *website* Badan Pusat Statistik Provinsi DIY yang berguna untuk mengetahui fluktuasi ekonomi di DIY. Jika berdasarkan pada prinsip *based on quick wins*, menunjukkan hasil yang baik tetapi terdapat catatan untuk Pemerintah DIY. Dimana perlu melakukan perbaikan seperti informasi COVID-19 dan perekonomian di DIY yang dapat berbentuk aplikasi agar dapat *diinstal* dan memudahkan pengguna dalam mengakses informasi tersebut.

#### **Systematic and Adaptive Approach (Pendekatan yang sistematis dan adaptif)**

Prinsip *systematic and adaptive approach* mengutamakan pada evaluasi program atau kebijakan yang dilakukan Pemerintah DIY dalam menangani krisis ekonomi pasca pandemi COVID-19. Salah satunya pada program penerapan SiBakul yang dilakukan Pemerintah DIY terdapat berapa evaluasi (Ridyadhotul, 2021), antara lain, yaitu:

1. Evaluasi *Input*, pada evaluasi ini tersedianya sumber daya manusia yang cukup memadai, anggaran yang dialokasikan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), dan sarana prasarana yang belum cukup memadai.
2. Evaluasi *Proses*, dalam proses sosialisasi lebih diutamakan kepada pelaku UMKM sedangkan kepada masyarakat masih kurang dan proses bisnis yang kurang efisien waktu.
3. Evaluasi *Output*, program SiBakul telah memiliki banyak peserta yaitu berjumlah 1.965 peserta dengan jumlah produk sebesar 3.092 produk dengan harga yang beragam.
4. Evaluasi *Outcome*, sektor UMKM DIY selalu mengalami peningkatan permintaan dan diimbangi juga dengan perluasan pasar dan omzet usaha.

Maka, dapat disimpulkan dalam prinsip *systematic and adaptive approach* menunjukkan hasil yang sangat baik karena adanya evaluasi dalam program yang dijalankan oleh Pemerintah DIY dalam menangani krisis ekonomi pasca pandemi COVID-19 sehingga dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan program.

### **Simple Design and Continuous Refinement (Desain yang sederhana dan berkelanjutan)**

Prinsip *simple design and continuous refinement* berfokus pada, jika adanya peningkatan perekonomian di DIY maka diperlukan langkah baru yang tepat untuk mempertahankan perekonomian agar tetap meningkat. Pemerintah DIY telah melakukan upaya dalam pembangunan infrastruktur dan program pemberdayaan UMKM DIY guna memulihkan ekonomi di DIY akibat pandemi COVID-19. Selain itu, Pemerintah DIY memiliki lima prioritas pembangunan di tahun 2022 untuk membantu memulihkan perekonomian (Humas DIY, 2022) antara lain yaitu (1) pemberdayaan sumber daya manusia yang berkualitas dengan indikator yang tepat, sehat, bermoral, dan berpendidikan, (2) pembangunan infrastruktur untuk layanan publik, (3) pengembangan di sektor-sektor unggulan seperti pariwisata, kuliner, dan pendidikan, (4) menciptakan pembangunan yang merata di berbagai penjuru DIY, dan (5) menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik atau *good governance*. Maka dapat disimpulkan, berdasarkan prinsip *simple design and continuous refinement* menunjukkan hasil yang sangat baik dengan adanya kebijakan pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan UMKM DIY serta adanya lima fokus Pemerintah Daerah DIY yang menjadi strategi dalam pemulihan perekonomian daerah pasca pandemi COVID-19.

## **KESIMPULAN**

Dengan dihadapkan pada krisis ekonomi pasca Pandemi COVID-19, baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah dituntut untuk cepat dan tepat dalam menangani krisis ekonomi. Jika Pemerintah tidak cepat dan tepat dalam menangani hal tersebut, maka Negara Indonesia akan menghadapi krisis ekonomi yang lebih buruk. Oleh karena itu, konsep *agile governance* memiliki peran yang penting dan sangat diperlukan dalam menghadapi krisis ekonomi pasca Pandemi COVID-19, karena *agile governance* merupakan konsep tata kelola pemerintahan yang cerdas karena memiliki keunggulan dalam melakukan simplifikasi terhadap sistem birokrasi dan fokus pada kecepatan dan kemudahan dalam mengelola pemerintahan. Jika Pemerintah Indonesia berhasil dalam

menerapkan konsep *agile governance* maka Pemerintah akan lebih cepat dan tanggap dalam menghadapi berbagai tantangan di masa yang akan datang.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dijelaskan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa Pemerintah DIY telah *agile* atau cepat, tepat, tanggap, dan gesit dalam menangani krisis ekonomi pasca pandemi COVID-19. Hal ini dibuktikan dengan keenam prinsip *agile governance* yang terpenuhi dengan sangat baik. Namun ada catatan di bagian prinsip *based on quick wins* yaitu dengan memperbaiki layanan informasi agar seluruh masyarakat dapat mengaksesnya dengan mudah. Pemerintah DIY juga telah menerapkan kebijakan yang sesuai dengan permasalahan yang dihadapi sehingga permasalahan dapat diatasi dengan baik. Hal ini dibuktikan dengan adanya partisipasi masyarakat dalam mengurangi penyebaran virus COVID-19 dan membantu dalam pemulihan ekonomi DIY, pemanfaatan teknologi dengan adanya situs SiBakul, kolaborasi dengan berbagai pihak atau instansi lain, melakukan evaluasi dalam menjalankan program, dan adanya kebijakan untuk mempertahankan keseimbangan ekonomi sehingga dapat mengurangi dampak dari pandemi COVID-19 di Daerah Istimewa Yogyakarta.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Agus. (2021, April 15). Dorong Vaksin Lansia, Pemda DIY Lakukan Kolaborasi Hingga Jemput Bola. Krjogja.Com. <https://www.krjogja.com/amp/berita-lokal/read/268550/dorong-vaksin-lansia-pemda-diy-hingga-jemput-bola>
- Apriliyanti, K. (2021). Narasi Budaya Arek Suroboyo dan Pandemi Covid-19 Sebuah Perspektif *Agile Governance* di Kota Surabaya. *Jurnal Transformative*, 7.
- BPK RI. (2021, January 18). Dampak Dari Pandemi COVID-19, Perekonomian di DIY Alami Kontraksi 6,74 %. Yogyakarta.Bpk.Go.Id. <https://yogyakarta.bpk.go.id/dampak-dari-pandemi-covid-19/>
- BPS Yogyakarta. (2021, April 28 ). Analisis Pertumbuhan dan Perubahan Struktur Perekonomian Daerah Istimewa Yogyakarta sebelum dan Selama Masa Pandemi Covid-19: Pendekatan 54 Kategori dan Sub Kategori Usaha. Yogyakarta.Bps.Go.Id. <https://yogyakarta.bps.go.id/publication/2021/04/28/814d6f552338d3ef9649bb30/analisis-pertumbuhan-dan-perubahan-struktur-perekonomian-daerah-istimewa-yogyakarta-sebelum-dan-selama-masa-pandemi-covid-19-pendekatan-54-kategori-dan-sub-kategori-usaha.html>

- Danar Ilham Kurniawan, Akbar Maulana, I. W. (2020). Agile Governance Sebagai Bentuk Transformasi Inovasi Pemerintah Daerah. *Jurnal Universitas Jember*.
- Fadli, M. R. (2021). Memahami desain metode penelitian kualitatif. 21(1), 33–54. <https://doi.org/10.21831/hum.v21i1>.
- Firhansyah, M. (2021, February 15). Agile Governance dalam Perspektif Pelayanan Publik. Ombudsman.Go.Id. <https://ombudsman.go.id/artikel--agile-governance-dalam-perspektif-pelayanan-publik-propartif>
- Hakim. (2020, May 31). Update: Sebaran 700 Kasus Baru Covid-19 pada 31 Mei. Kompas.Com. <https://nasional.kompas.com/read/2020/05/31/16302061/update-sebaran-700-kasus-baru-covid-19-pada-31-mei>
- Halim, F. R., Astuti, F., & Umam, K. (2021). Implementasi Prinsip Agile Governance Melalui Aplikasi PIKOBAR di Provinsi Jawa Barat. *Kolaborasi: Jurnal Administrasi Publik*, 7(1), 48–67.
- Helen. (2023, January 23). Yogyakarta jadi Provinsi Termiskin tapi Penduduknya Hidup Bahagia. Pramborsfm.Com. <https://www.pramborsfm.com/amp/news/yogyakarta-jadi-provinsi-termiskin-tapi-penduduknya-hidup-bahagia>
- Humas DIY. (2022, July 26). Pembangunan Infrastruktur diharapkan Bantu Pertumbuhan Ekonomi DIY. Jogjaprov.Go.Id. <https://jogjaprov.go.id/berita/pembangunan-infrastruktur-diharapkan-bantu-pertumbuhan-ekonomi-diy>
- Humas Provinsi Jogja. (2021, April 07). Sinergi Dan Inovasi Untuk Pemulihan Ekonomi DIY. Jogjaprov.Go.Id. <https://jogjaprov.go.id/berita/sinergi-dan-inovasi-untuk-pemulihan-ekonomi-diy>
- Jafar, M. (2022). Adaptive, Agile atau Robust Governance untuk Menjaga Ketahanan Daerah dalam Menghadapi Pandemi Covid-19 Studi Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah di Jawa Timur Tahun 2020-2022. *Jurnal Transformative*, 8.
- Kusumawati, W. (2021). Agile Governance Dinas Kesehatan Kabupaten Tulungagung dalam Menangani Covid-19. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences*, 2.
- Listyadewi. (2020). Peran Sektor Swasta dalam respon terhadap COVID-19: Studi Kasus di Yogyakarta. *Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia*, 9, 218–224.
- Nasruddin, R. (2020). Pembatasan Sosial Berskala Besar ( PSBB ) dan Masyarakat Berpenghasilan Rendah. *Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I*, 7. <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v7i7.15569>

- Nugraheny. (2020, April 07). Update per 31 Maret: 1.528 Kasus Covid-19, Masyarakat Diajak Saling Beri Edukasi. Kompas.Com. <https://nasional.kompas.com/read/2020/04/01/0629/531/update-per-31-maret-1528-kasus-covid-19-masyarakat-diajak-saling-beri-edukasi>
- Nurul Siti Ambia Zahra, Nanang Suparman, S. A. (2022). Penerapan Prinsip Agile Governance Dalam Pelayanan Publik Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung. *Jurnal Inovasi Penelitian*, 3.
- Padmaningrum. (2021). Penyederhanaan Birokrasi Melalui Agile Governance Menuju Layanan Prima. *Jurnal Ivet Teacherpreneur*, 2, 54–64.
- Pemda DIY. (2022, June 23). Langkah DIY Turunkan Angka Kemiskinan dan Kesenjangan Antar Wilayah. Jogjaprovo.go.id. <https://jogjaprovo.go.id/berita/langkah-diy-turunkan-angka-kemiskinan-dan-kesenjangan-antar-wilayah>
- Prayudi, M. A. (2020). Dampak Covid-19 Terhadap Pariwisata di Daerah Istimewa Yogyakarta. *Jurnal Nusantara (Jurnal Ilmiah Pariwisata Dan Perhotelan)*, 3, 14–20.
- Putra, M. W. P. (2020). PENGARUH COVID-19 TERHADAP KEHIDUPAN EKONOMI DAN SPIRITUAL KEAGAMAAN. *Jurnal Sosial Keagamaan*, 1, 144–159.
- Putri, A. Z. (2022). Pendampingan Peran Digital Marketing dan Pemasaran dalam Upaya Keberlangsungan Hidup pada UMKM yang tergabung dalam SiBakul. *Jurnal Dharma Bakti*, 5, 235–246.
- Ridyadhotul, R. (2021). *Evaluasi Pelaksanaan Program SiBakul Markethub Free Ongkos Kirim (Studi pada Dubas Koperasi dan UKM DIY)*. Universitas Gadjah Madha.
- Rusqiyati, E. A. (2022, August 22). BPD DIY menyalurkan dana CSR untuk mendukung penanggulangan kemiskinan. Jogja.Antarnews.Com. <https://jogja.antarnews.com/amp/berita/572301/bpd-diy-menyalurkan-dana-csr-untuk-dukung-penanggulangan-kemiskinan>
- Sari, P. K. (2016). Identifikasi Penyebab Krisis Moneter dan Kebijakan Bank Sentral di Indonesia: Kasus Krisis Tahun (1997-1998 dan 2008). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa*, 2, 337–338.
- Saut Sagala, Arief Rosyidie, Amesta K. Ramadhani, Danang Azhari, Alma N. Annisa, R. N. V. dan M. D. M. (2020). Covid-19 in Indonesia An Analysis of DKI Jakarta's Covid-19 Pandemic Response and its Governance During the New Normal Period. *Altantis Press*, 514.

- Utama, A. (2021, May 20). Virus Baru: Coronavirus dan Penyakit SARS. Lipi.Go.Id/.  
lipi.go.id/berita/virus-baru--:coronavirus-dan-penyakit-sars/176
- Vernanda, R., & Negar, L. A. (2009). Kesiapan Indonesia Menuju Agile Governance Rengga  
Vernanda Indonesia ' s Readiness Towards Agile Governance. *Konferensi Nasional  
Ilmu Administrasi*, 1–6.
- Vort, M. J. dan H. Van Der. (2020). Agile and Adaptive Governance in Crisis Response  
Lessons from the COVID-19 Pandemic. *International Journal of Information  
Management*.
- WHO. (2020, March 11). WHO Director-General's Opening Remarks at The Media Briefing on  
COVID-19 - 11 March 2020. Wwww.Who.Int. [https://www.who.int/speeches/detail/who-  
director-general-s-opening-remarks-at-the-media-briefing-on-covid19---11-march-  
2020](https://www.who.int/speeches/detail/who-director-general-s-opening-remarks-at-the-media-briefing-on-covid19---11-march-2020)
- Zubaidah, T. (2021). KRISIS EKONOMI BANGSA INDONESIA DIMASA PANDEMI COVID-19. :  
: *Jurnal Nasional Indonesia*, 1, 103–111.